



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1983, 2016

LAN. PNB. Analis Kebijakan. Penilaian Kualitas.
Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KUALITAS HASIL KEGIATAN
ANALIS KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penilaian kualitas hasil kegiatan analis kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1769);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1330);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1461);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Penilaian

Kualitas Hasil Kerja Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1225);

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KUALITAS HASIL KEGIATAN ANALIS KEBIJAKAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analisis Kebijakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analisis Kebijakan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2016, No. 1983

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
KUALITAS HASIL KEGIATAN
ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Pengertian	7
BAB II RINCIAN SATUAN HASIL KEGIATAN SERTA PERSYARATAN	9
A. Unsur Utama	9
B. Unsur Penunjang	15
BAB III ANGKA KREDIT DAN PEMBOBOTAN SATUAN HASIL KEGIATAN	17
A. Distribusi Angka Kredit untuk Tim	17
B. Distribusi Angka Kredit untuk Kelompok	18
C. Distribusi Angka Kredit untuk Individu	18
BAB IV KETENTUAN LAIN	20
BAB V PENUTUP	21

FORMULIR-FORMULIR

FORMULIR 1 : Tabel Penghitungan Angka Kredit

FORMULIR 2 : Formulir *Self-Assessment*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengedepankan profesionalisme, independensi, dan kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN), semua pegawai dituntut untuk berkinerja, tidak terkecuali Analis Kebijakan. Sebagai upaya untuk memandu pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan kinerja tersebut, dibutuhkan sebuah pedoman yang mengatur tentang penilaian kualitas hasil kegiatan analisis kebijakan. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, bahwa setiap Analis Kebijakan wajib mencatat, menginventarisir dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.

Petunjuk teknis tentang penilaian kualitas hasil kegiatan ini disusun untuk memberikan panduan bagi Analis Kebijakan dalam mendokumentasikan hasil kerja/kegiatannya dan memberikan kesamaan persepsi antara Analis Kebijakan dan Tim Penilai tentang **rincian kriteria, sub kriteria dan bukti pada masing-masing penilaian kualitas hasil kegiatan** Analis Kebijakan.

B. Tujuan dan Sasaran

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Analis Kebijakan dan Tim Penilai dalam penilaian kualitas hasil kegiatan.

Dengan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam petunjuk teknis ini adalah:

1. Penilaian dan penghitungan angka kredit bisa dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Adanya kesamaan persepsi dalam penilaian kualitas hasil kegiatan dan penghitungan angka kredit antara Analis Kebijakan dengan Tim Penilai.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
2. Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
4. Tim Penilai Angka Kredit JFAK yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit Analis Kebijakan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebijakan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan adalah Penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja analis kebijakan dengan menggunakan kriteria-kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti satuan hasil kegiatan.
10. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah sebuah tulisan cetak maupun non cetak yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok dan disusun secara sistematis, serta menawarkan solusi terhadap kondisi problematis tertentu.
11. Kertas Kerja Kebijakan adalah sebuah tulisan cetak maupun non cetak yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok yang berkaitan dengan tugas kedinasan di lingkungan instansi pusat dan daerah.
12. Ringkasan Kebijakan yang selanjutnya disebut *policy brief* adalah dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan.

BAB II

RINCIAN SATUAN HASIL KEGIATAN SERTA PERSYARATAN

Kategori satuan hasil kegiatan analisis kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu KTI dan Kertas Kerja Kebijakan. KTI terdiri atas *policy brief*, *policy paper*, makalah, dan artikel kebijakan, sedangkan satuan hasil kegiatan lainnya termasuk dalam kategori Kertas Kerja Kebijakan. Untuk satuan hasil kegiatan yang tergolong KTI, proses penilaiannya akan dilakukan oleh Tim Penilai dan Tim Ahli. Ketentuan lebih lanjut mengenai KTI akan diatur dalam sebuah panduan. Sedangkan penilaian kertas kerja kedinasan akan dilakukan oleh Tim Penilai.

Penilaian angka kredit JFAK dibedakan menjadi dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang.

1. Unsur Utama

a. Pendidikan

Berikut adalah rincian kegiatan dan satuan hasil pada unsur pendidikan:

1) Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar

Pendidikan formal/sekolah yang terakreditasi dan memperoleh gelar/ijazah dimaksudkan sebagai pendidikan formal yang diikuti Analisis Kebijakan pada lembaga pendidikan paling kurang terakreditasi B.

a) Kriteria Penilaian:

- Analisis kebijakan dengan pendidikan profesi yang disetarakan dengan ijazah S2 (Profesi dokter, apoteker, dan profesi lain yang disetarakan) tidak mendapatkan kenaikan angka kredit ketika menempuh pendidikan magister dan memperoleh ijazah S2.
- Ijazah yang digunakan adalah ijazah yang diakui oleh instansinya dan dijadikan dasar instansi dalam pengusulan (juga dalam kenaikan pangkat).
- Ijazah yang diajukan dalam unsur utama harus ijazah yang memiliki rumpun yang sama dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengusulan.

- Kriteria lain selain kriteria yang telah disebutkan diatas sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara yang berlaku.

b) Kelengkapan bukti :

- Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan/dilegalisir oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi minimal B (kelulusan dalam negeri);
- Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh kementerian yang membidangi pendidikan (kelulusan luar negeri).

2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis di Bidang Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Keikutsertaan Analis Kebijakan dalam Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka menunjang pengembangan kompetensi.

a) Kriteria Penilaian tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Teknis di Bidang Kebijakan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara yang berlaku.

b) Kelengkapan bukti:

- Surat penugasan atau surat perintah melaksanakan kegiatan dari instansi;
- Surat pernyataan melaksanakan kegiatan (SPMK); dan
- Fotokopi STTPP/Sertifikat Diklat yang dilegalisir pimpinan Lembaga Diklat yang bersangkutan.

3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Keikutsertaan Analis Kebijakan pada Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Angka kredit untuk sub unsur pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi analis kebijakan dengan pengangkatan pertama hanya dihitung pada penentuan awal Penetapan Angka Kredit (PAK) Analis Kebijakan.

b. Kajian dan Analisis Kebijakan

Penjelasan mengenai kriteria, sub kriteria, indikator dan bukti satuan hasil kegiatan pada unsur kajian dan analisis kebijakan dapat dilihat pada Formulir 1.

- 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri/ Peraturan Lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Naskah akademik ini merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/ Peraturan Lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

- 2) Buku referensi kebijakan

Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai bahan informasi/rujukan yang mutakhir dan digunakan sebagai acuan dalam lingkup kebijakan.

- 3) *Policy Paper*

Policy Paper adalah dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik/tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan.

- 4) Monograf kebijakan

Monograf kebijakan adalah dokumen tertulis yang spesifik berisi satu atau sejumlah topik/subyek yang berkaitan dan merupakan terbitan tunggal/tidak berkelanjutan.

- 5) *Policy Brief*

Policy brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan.

6) Laporan Hasil Pemantauan

Laporan Hasil Pemantauan adalah dokumen tertulis yang berisi laporan dan pencatatan hasil observasi rutin dan analisis aktifitas sebuah kebijakan yang memberikan feedback dalam pelaksanaan kebijakan.

7) Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi adalah dokumen tertulis yang berisi laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan baik berupa evaluasi untuk meningkatkan produk/proses, ataupun evaluasi yang bertujuan menganalisis tujuan sebuah kebijakan.

8) Artikel Kebijakan

Artikel kebijakan adalah dokumen karya tulis (*essay*) tentang suatu topik atau masalah tertentu yang dimuat di majalah, surat kabar, atau media lain sejenis.

9) Makalah Kebijakan

Makalah Kebijakan adalah tulisan resmi tentang suatu topik kebijakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan ilmiah.

10) Telaahan Staf

Telaahan staf adalah naskah dinas yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat serta saran-saran yang dibuat oleh bawahan.

11) Bahan pidato/ceramah/presentasi

Bahan pidato/ceramah/presentasi merupakan bahan atau materi tertulis tentang kebijakan yang disiapkan oleh analis kebijakan untuk pidato/ceramah/presentasi.

12) Memo Kebijakan

Memo kebijakan merupakan rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas.

13) Surat Penugasan

Surat penugasan adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi dan ditujukan kepada Analis Kebijakan

untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang terkait dengan tupoksinya sebagai Analis Kebijakan. Surat penugasan yang dapat dihitung angka kreditnya adalah surat penugasan yang tidak digunakan sebagai bukti proses dalam satuan hasil kegiatan yang lain.

14) Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi

Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi merupakan dokumen yang dibuat Analis Kebijakan untuk mendokumentasikan hasil pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya maupun diskusi dengan stakeholder yang terkait dengan lingkup pekerjaan Analis Kebijakan.

Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi yang dapat dihitung angka kreditnya adalah Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi yang tidak digunakan sebagai bukti proses dalam satuan hasil kegiatan yang lain.

15) Laporan Advokasi Kebijakan

Laporan Advokasi Kebijakan merupakan dokumen yang dibuat Analis Kebijakan untuk mendokumentasikan upaya yang dilakukan Analis Kebijakan untuk mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah.

16) Laporan Diseminasi Kebijakan

Laporan Diseminasi Kebijakan merupakan dokumen yang dibuat Analis Kebijakan untuk mendokumentasikan upaya yang dilakukan dalam penyebarluasan informasi, pemikiran, dan hasil penelitian yang terkait dengan kebijakan.

c. Pengembangan Profesi

Untuk menjamin kualitas profesi Analis Kebijakan kriteria hanya digunakan secara khusus pada **sub unsur kajian dan analisis kebijakan**, namun untuk menjamin kualitas hasil kegiatan secara keseluruhan, pada beberapa sub unsur pengembangan profesi juga diatur mengenai kriteria, sub kriteria, indikator dan bukti satuan hasil kegiatan yang dapat dilihat pada Formulir 1.

Rincian satuan hasil kegiatan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh Analisis Kebijakan pada masing-masing satuan hasil sebagai berikut:

1) Ijazah

Satuan hasil ijazah pada unsur pengembangan profesi, merupakan gelar/ijazah kejarjanaan lain yang tidak sesuai dengan bidang tugas atau kepakarannya. Dimana Analisis kebijakan dapat mengikuti pendidikan formal yang tidak sesuai kepakarannya. Besaran angka kredit yang diperoleh pada satuan hasil ijazah di unsur ini berbeda pada unsur pendidikan. Berikut adalah kriteria dan kelengkapan bukti yang harus dipenuhi:

a) Kriteria Penilaian: Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang paling kurang terakreditasi B, dan telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari instansi yang berwenang. Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari instansi berwenang di Indonesia.

b) Kelengkapan bukti :

- Surat tugas/izin belajar dari pejabat yang berwenang
- Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar dengan melampirkan:
 - Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan/dilegalisir oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi minimal B (kelulusan dalam negeri);
 - Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh kementerian yang membidangi pendidikan (kelulusan luar negeri).

2) Modul diklat

Modul Diklat adalah alat bantu diklat kebijakan yang digunakan dalam proses belajar mengajar berupa buku pegangan bagi peserta diklat yang disusun secara sistematis, mencakup tujuan dan uraian materi diklat, latihan dan evaluasi terhadap peserta mengenai materi diklat dimaksud.

3) Model kebijakan

Model Kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah tertentu, dapat berupa konsep/teori, diagram, grafik, atau persamaan matematis.

4) Alat bantu

Alat Bantu (perangkat keras/lunak) pelatihan Kebijakan adalah alat-alat yang digunakan dalam pelatihan analisis kebijakan oleh fasilitator.

5) Alat bantu gambar/suara diklat

Alat Bantu gambar/suara Diklat Kebijakan adalah perangkat alat-alat baik dalam bentuk gambar/suara yang digunakan dalam pelatihan analisis kebijakan oleh fasilitator

6) Buku pedoman

Buku pedoman adalah buku yang berisi informasi, petunjuk, dll dalam lingkup kebijakan yang menjadi acuan pembaca untuk mengetahui secara lengkap.

7) Petunjuk pelaksanaan (Juklak)/petunjuk pelaksanaan (juknis)

Petunjuk Pelaksanaan adalah tulisan dinas pengaturan di bidang analisis kebijakan yang memuat pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya.

Juknis tulisan dinas pengaturan di bidang analisis kebijakan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis, tidak menyangkut wewenang dan prosedur.

8) Surat pernyataan/gelar kehormatan

Surat tanda memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya yang dibuktikan dengan tanda jasa atau surat penghargaan.

9) Piagam Satya Lencana Karya Satya

Adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10, 20,30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

10) Piagam penghargaan

Piagam penghargaan adalah tanda bukti penghargaan atas jasa, tanda kehormatan dari pemerintah, baik pemerintah pada tingkat nasional maupun provinsi. Bintang jasa, bintang maha putra, hadiah pendidikan, hadiah ilmu pengetahuan, hadiah pengabdian dll.

2. Unsur Penunjang

Berikut adalah rincian kegiatan, dan kriteria (berupa kelengkapan dokumen) yang harus dipenuhi oleh Analis Kebijakan pada unsur penunjang tugas analisis kebijakan:

- a. Menjadi pengajar/pelatih pada pelatihan fungsional/teknis di bidang kebijakan

Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berupa interaksi antara peserta dan analis kebijakan dalam kegiatan mendidik, mengajar, dan/atau melatih peserta diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan. Bukti yang harus dilampirkan yaitu: Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- b. Peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang kebijakan

Peran Analis Kebijakan dalam seminar/lokakarya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang kebijakan antara lain sebagai Pemrasaran/narasumber, Pembahas/moderator, Ketua panitia penyelenggara/delegasi ilmiah, Peserta, Anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah yang dibuktikan dengan Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan sertifikat asli yang harus dicetak dalam lembaran khusus untuk sertifikat.

- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi

Organisasi profesi adalah organisasi profesi jabatan fungsional analis kebijakan. Subtansi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi yaitu fotocopy Keputusan tentang kepengurusan dalam organisasi profesi dari organisasi profesi terkait per tahun yang dilegalisir oleh pimpinan organisasi profesi dan fotocopy kartu anggota organisasi profesi yang dilegalisir oleh pimpinan organisasi profesi terkait pertahun.

Satuan hasil : setiap tahun

- d. Keanggotaan dalam tim penilaian jabatan fungsional analis kebijakan

Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analisis Kebijakan. Subtansi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi antara lain Keputusan tentang Tim Penilai, Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Kegiatan penunjang tugas AK yang mencantumkan jumlah berkas DUPAK yang diperiksa dan angka kreditnya, serta laporan rekapitulasi pemeriksaan DUPAK.

Satuan hasil : setiap DUPAK

BAB III

ANGKA KREDIT DAN PEMBOBOTAN SATUAN HASIL KEGIATAN

Dalam melaksanakan penulisan dan pembuatan satuan hasil kegiatan, Analisis kebijakan dapat bekerja secara individu, tim, maupun kelompok. Berikut adalah distribusi angka kredit sesuai pengerjaan satuan hasil kegiatan dan mekanisme pengusulan DUPAK:

A. Distribusi angka kredit untuk tim

Distribusi angka kredit untuk tim adalah angka kredit maksimal bagi penulisan satuan hasil yang dikerjakan secara tim. Dalam tim tersebut ada pembagian tugas antara ketua dan anggota, dimana angka kredit yang diperoleh dibagi sesuai kedudukan dan jumlah anggota, dengan rincian pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 6 Pendistribusian Angka Kredit

Jumlah Tim	Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
orang	%	%	%	%	%	%
2	60	40				
3	50	25	25			
4	40	20	20	20		
5	40	15	15	15	15	
6	40	12	12	12	12	12

Keterangan:

1. Apabila Tim terdiri dari 2 (dua) orang maka Ketua proporsinya 60% dan Anggota proporsinya 40%.
2. Apabila Tim terdiri dari 3 (tiga) orang maka Ketua proporsinya 50% dan sisanya dibagi sama rata.
3. Apabila Tim terdiri dari 4 (empat) orang atau lebih maka Ketua proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah Anggota yang terlibat.

Contoh pembagian angka kredit:

- *Dhino adalah seorang AK yang ingin mengumpulkan angka kredit melalui satuan hasil **naskah akademik RUU**. Penyusunanya dilakukan dalam tim dengan jumlah **anggota 5 orang dan ketua 1 orang**. Untuk angka kredit maksimal satuan hasil naskah akademik RUU adalah 40, dimana Dhino **sebagai ketua** berhak memperoleh angka kredit maksimal **sebesar 40% dari 40** yaitu sebesar 16. Angka tersebut **adalah angka maksimal** yang dapat Dhino peroleh jika Naskah Akademik yang diajukan **memenuhi keseluruhan kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti yang dipersyaratkan**. Sedangkan bagi Toofik, seorang AK yang ingin mengumpulkan angka kredit melalui satuan hasil **naskah akademik RUU**. Penyusunanya dilakukan dalam tim dengan jumlah **anggota 5 orang dan ketua 1 orang**. Untuk angka kredit maksimal satuan hasil naskah akademik RUU adalah 40, dimana Toofik **sebagai anggota** berhak memperoleh angka kredit maksimal **sebesar 12% (diperoleh dari 60% : 5 = 12%) dari 40** yaitu sebesar 4,8. Angka tersebut **adalah angka maksimal** yang dapat Toofik peroleh jika Naskah Akademik yang diajukan **memenuhi keseluruhan kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti yang dipersyaratkan**.*

B. Distribusi angka kredit untuk kelompok (tidak ada pembagian tugas ketua dan anggota)

Distribusi angka kredit untuk kelompok dibagi sesuai dengan jumlah anggota. Dalam kelompok tersebut tidak ada pembagian tugas antara ketua dan anggota. Contoh pembagian angka kredit:

*Ratno adalah seorang AK yang ingin mengumpulkan angka kredit melalui satuan hasil **POLICY BRIEF**. Penyusunanya dilakukan secara sharing dengan jumlah **penyusun 2 orang**. Untuk angka kredit maksimal satuan hasil policy brief adalah 10, dimana Ratno **sebagai salah satu penyusun** berhak memperoleh angka kredit maksimal **sebesar 50% (diperoleh dari 100% : 2= 50%) dari 10** yaitu sebesar 5. Angka tersebut **adalah angka maksimal** yang dapat Ratno peroleh jika Policy Brief yang diajukan **memenuhi keseluruhan kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti yang dipersyaratkan**.*

C. Distribusi angka kredit untuk individu

Angka kredit yang diperoleh dari satuan hasil yang dikerjakan secara individu merupakan angka kredit maksimal setelah memenuhi keseluruhan kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti yang dipersyaratkan. Contoh penghitungan angka kredit individu:

*Agit adalah seorang AK yang ingin mengumpulkan angka kredit melalui satuan hasil **POLICY BRIEF**. Penyusunannya dilakukan secara individu. Untuk angka kredit maksimal satuan hasil policy brief adalah 10, dimana Agit **sebagai penyusun** berhak memperoleh angka kredit maksimal **sebesar 10**. Angka tersebut **adalah angka maksimal** yang dapat diperoleh jika Policy Brief yang diajukan **memenuhi keseluruhan kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti yang dipersyaratkan**.*

Untuk mempermudah penghitungan angka kredit pada masing-masing satuan hasil, dapat digunakan tabel penghitungan angka kredit seperti pada **Formulir 1**.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

1. Angka kredit dapat diajukan sebagai hasil tambahan untuk uji kompetensi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung dari surat rekomendasi sampai dengan sebelum penetapan/pengangkatan.
2. STTPP pelatihan Calon Analis Kebijakan, STTPP Diklat Prajabatan dan Ijazah S1, serta Ijazah S2 tidak termasuk dalam penghitungan angka kredit, karena termasuk dalam komposisi penilaian uji kompetensi.
3. Batas waktu pengusulan kegiatan Analis Kebijakan untuk dinilai angka kreditnya paling lama 2 (dua) tahun sejak kegiatan itu dilakukan dan tidak dapat dinilai apabila melampaui batas waktu dimaksud.
4. Sistem penilaian angka kredit yang digunakan bersifat absolut, yaitu menilai kesesuaian kegiatan dengan kriteria, indikator serta bukti yang ditentukan, dan apabila tidak memenuhi persyaratan dimaksud, maka dinilai 0 (nol).
5. Hasil PAK dapat dibatalkan oleh pejabat yang menetapkan, apabila dikemudian hari terdapat pembuktian oleh Tim Penilai atas kecurangan dalam usulan angka kredit analisis kebijakan.
6. Dalam pengusulan DUPAK, selain dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi, analisis kebijakan juga wajib melampirkan hasil *self assessment* (**formulir 2 tentang formulir *self assessment***) yang telah dilakukan terhadap setiap satuan hasil kegiatan yang dikerjakan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan penilaian kualitas hasil kerja Analisis Kebijakan. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2016

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

Untuk mempermudah penghitungan angka kredit pada masing-masing satuan hasil, dapat digunakan tabel penghitungan angka kredit. Tabel berikut disusun berdasarkan satuan hasil yang dapat dikerjakan oleh seorang Analis Kebijakan. Terdapat sepuluh kolom dalam tabel tersebut, yaitu:

➤ Kolom A : satuan hasil

➤ Kolom B : Angka kredit maksimal untuk satuan hasil

untuk mengisi kolom ini harus diperhatikan posisi dan kedudukan analis kebijakan, (apakah sebagai ketua, anggota, individu, atau kelompok) gunakan rumus yang telah dituliskan pada kolom tersebut

➤ Kolom C : kriteria

➤ Kolom D : angka kredit maksimal untuk untuk kriteria

Untuk mengisi kolom ini, gunakan rumus yang ada pada kolom C

➤ Kolom E : Sub kriteria

➤ Kolom F : angka kredit maksimal untuk sub kriteria

Untuk mengisi kolom ini, gunakan rumus yang ada pada kolom E

➤ Kolom G : indikator

➤ Kolom H : angka kredit maksimal untuk indikator

Untuk mengisi kolom ini, gunakan rumus yang ada pada kolom G

➤ Kolom I : bukti

➤ Kolom J : angka kredit total

Untuk mengisi kolom ini, gunakan ketentuan yang ada pada kolom J.

Tabel 1 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Naskah Akademik RUU

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 40) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 40)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Naskah Akademik RUU		1 Kompleksitas (D1=40% x B)		1 Keluasan cakupan (F1=50% x D1)		a Jenis naskah akademik (RUU) (50% x F1)		a Surat/ nota dinas penyempitan naskah akademik RUU ke legislatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
								b Dokumen naskah akademik RUU	
								c Rancangan awal RUU	
				b Kualitas produk (output) (50% x F1)		a Dokumen naskah akademik RUU (sesuai dengan outline yang disyaratkan)		Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
						b Dokumen naskah akademik RUU (tidak sesuai dengan outline yang disyaratkan)			
2 Tingkat kesulitan isi dan masalah kebijakan (F2=50% x D1)		a Kualitas analisis dalam perumusan kebijakan (F2a= 40% x F2)		a Data digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik RUU menggunakan data sebagai dasar analisa		Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
									b DIM (daftar inventarisasi masalah)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 40) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 40)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						b Teori digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
								a Dokumen naskah akademik RUU menggunakan teori sebagai dasar analisa	
								b DIM (daftar inventarisasi masalah)	
						c Data dan teori digunakan sebagai dasar analisa (haranya digunakan ketika data dan teori dipakai sebagai dasar analisa) (100% x F2a)		a Dokumen naskah akademik RUU menggunakan data dan teori sebagai dasar analisa	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
								b DIM (daftar inventarisasi masalah)	
								c Instrumen dan laporan hasil penelitian	
b. Sektor yang terkait (F2b= 30% x F2)		a Kompleksitas sektor yang terkait dalam penyusunan naskah akademik RUU		a		a Substansi Dokumen naskah akademik RUU terdiri dari satu sektor		Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 40) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 40)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				c. Proses perumusan Naskah Akademik (F2c= 30% x F2)		(100% x F2b)		b Substansi Dokumen naskah akademik RUU terdiri dari multisektor	melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						a Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik RUU (100% x F2c)		a Notulensi rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H)
								b Daftar konsultasi dari hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder < 3	Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H)
								c Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder ≥ 3	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemanfaatan dan publikasi (D2= 60% x B)		1 Penggunaan naskah akademik dalam UU (100% x D2)		a Adopsi naskah akademik dalam undang-undang (100% x F)		a Dokumen naskah akademik RUU	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H)
								b Rancangan awal RUU sepenuhnya mengacu pada naskah akademik	Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H)
								c Rancangan awal RUU tidak mengacu pada naskah akademik	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
								d Notulensi pembahasan dengan legislatif	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 40) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 40)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								c DIM (daftar inventarisasi masalah)	
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 2 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Naskah Akademik RPP

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 36) (Anggota : (60% /jmlh anggota)x 36)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Naskah Akademik RPP		1 Kompleksitas (D1=40% x E)		1 Keluasan cakupan (F1=50% x D1)		a Jenis naskah akademik RPP (50% x F1)		a Surat/ nota dinas penyampaian naskah akademik RPP ke legislatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				b Kualitas produk (output) (50% x F1)		b Dokumen naskah akademik RPP		Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
						c Rancangan awal RPP			
				2 Tingkat kesulitan isu dan masalah kebijakan (F2=50% x D1)		a Data digunakan sebagai dasar analisa		a Dokumen naskah akademik RPP menggunakan data sebagai dasar analisa	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan
			a. Kualitas analisis dalam perumusan kebijakan						

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 36) (Anggota : (60% /jmlh anggota)x 36)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				(F2a= 40% x F2)		(50% x F2a)		b DIM (daftar inventarisasi masalah)	bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Instrumen dan laporan hasil penelitian			
				b Teori digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik RPP menggunakan teori sebagai dasar analisa		Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H)	
						b DIM (daftar inventarisasi masalah)		Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
						c Instrumen dan laporan hasil penelitian			
						c Data dan teori digunakan sebagai dasar analisa (*hanya digunakan ketika data dan teori dipakai sebagai dasar analisa) (100% x F2a)		a Dokumen naskah akademik RPP menggunakan data dan teori sebagai dasar analisa	b DIM (daftar inventarisasi masalah)
		c Instrumen dan laporan hasil penelitian							
	b. Sektor yang terkait (F2b= 30% x F2)			a Kompleksitas sektor yang terkait dalam penyusunan		a Substansi Dokumen naskah akademik RPP terdiri dari satu sektor	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan		

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 36) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 36)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						naskah akademik RPP (100% x F2b)		b Substansi Dokumen naskah akademik RPP terdiri dari multisektor	bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				c. Proses perumusan Naskah Akademik (F2e= 30% x F2)		a Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik RPP (100% x F2e)		a Notulensi rapat b Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder < 3 c Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder ≥ 3	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemanfaatan dan publikasi (D2= 60% x E)		1 Penggunaan naskah akademik dalam PP (100% x D2)		a Adopsi naskah akademik dalam peraturan pemerintah (100% x F)		a Dokumen naskah akademik RPP b Rancangan awal RFP sepenuhnya mengacu pada naskah akademik c Rancangan awal RFP tidak mengacu pada naskah akademik d Notulensi pembahasan dengan legislatif e DIM (daftar inventarisasi masalah)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 3 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Naskah Akademik Raperpres

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 32) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 32)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Naskah Akademik Raperpres		1 Kompleksitas (D1=40% x B)		1 Keluasan cakupan (F1=50% x D1)		a Jenis naskah akademik (Raperpres) (50% x F1)		a Surat/ nota dinas penyampaian naskah akademik Raperpres ke legislatif b Dokumen naskah akademik Raperpres c Rancangan awal Raperpres	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Kualitas produk (output) (50% x F1)		a Dokumen naskah akademik Raperpres (sesuai dengan outline yang disyaratkan) b Dokumen naskah akademik Raperpres (tidak sesuai dengan outline yang disyaratkan)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				2 Tingkat kesulitan isu dan masalah kebijakan (F2=50% x D1)					

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 32) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 32)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				a. Kualitas analisis dalam perumusan kebijakan (F2a= 40% x F2)		a Data digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik Raperpres menggunakan data sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Teori digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik Raperpres menggunakan teori sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Data dan teori digunakan sebagai dasar analisa (theory digunakan ketika data		a Dokumen naskah akademik Raperpres menggunakan data dan teori sebagai dasar analisa	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 32) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 32)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
						dan teori dipakai sebagai dasar analisa) (100% x F2a)		b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian		
				b. Sektor yang terkait (F2b= 30% x F2)		a Kompleksitas sektor yang terkait dalam penyusunan naskah akademik Raperpres (100% x F2b)		a Substansi Dokumen naskah akademik Raperpres terdiri dari satu sektor b Substansi Dokumen naskah akademik Raperpres terdiri dari multisektor	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
				c. Proses perumusan Naskah Akademik (F2c= 30% x F2)		a Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik Raperpres (100% x F2c)		a Notulensi rapat b Daftar konsultasi dan hasil konsultasi keterlibatan stakeholder < 3 c Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder ≥ 3	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
		2	Kemudahan dan publikasi (D2= 60% x B)	1	Penggunaan naskah akademik dalam Perpres	a	Adopsi naskah akademik dalam akademik	a	Dokumen naskah akademik Raperpres	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 32) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 32)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				(100% x D2)		peraturan presiden (100% x F)		b Rancangan awal Raperpres sepenuhnya mengacu pada naskah akademik c Rancangan awal Raperpres tidak mengacu pada naskah akademik d Notulensi pembahasan dengan legislatif e DIM (daftar inventarisasi masalah)	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 4 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Naskah Akademik Rapermen

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 24) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 24)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Naskah Akademik Rapermen/ Peraturan Lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku		1 Kompleksitas (D1=40% x B)		1 Keluasan cakupan (F1=50% x D1)		a Jenis naskah akademik (Rapermen) (50% x F1)		a Surat/ nota dinas penyampaian naskah akademik Rapermen ke legislatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Dokumen naskah akademik Rapermen			
						c Rancangan awal Rapermen			
						b Kualitas produk (output) (50% x F1)		a Dokumen naskah akademik Rapermen (sesuai dengan outline yang disyaratkan)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
	b Dokumen naskah akademik Rapermen (tidak sesuai dengan outline yang disyaratkan)								
				2 Tingkat kesulitan isu dan masalah kebijakan (F2=50% x D1)					

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 24) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 24)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				a. Kualitas analisis dalam perumusan kebijakan (F2a= 40% x F2)		a. Data digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a. Dokumen naskah akademik Rapermen menggunakan data sebagai dasar analisa b. DIM (daftar inventarisasi masalah) c. Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0% H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% H)
						b. Teori digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a. Dokumen naskah akademik Rapermen menggunakan teori sebagai dasar analisa b. DIM (daftar inventarisasi masalah) c. Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0% H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% H)
						c. Data dan teori digunakan sebagai dasar analisa (*hanya digunakan ketika data dan teori dipakai		a. Dokumen naskah akademik Rapermen menggunakan data dan teori sebagai dasar analisa b. DIM (daftar inventarisasi masalah)	Tdk memenuhi bukti minimal (0% H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 24) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 24)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						sebagai dasar analisa) (100% x F2a)		c. Instrumen dan laporan hasil penelitian	
				b. Sektor yang terkait (F2b= 30% x F2)		a. Kompleksitas sektor yang terkait dalam penyusunan naskah akademik Rapermen (100% x F2b)		a. Substansi Dokumen naskah akademik Rapermen terdiri dari satu sektor b. Substansi Dokumen naskah akademik Rapermen terdiri dari multisektor	Tdk memenuhi bukti minimal (0% H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% H)
				c. Proses perumusan Naskah Akademik (F2c= 30% x F2)		a. Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik Rapermen (100% x F2c)		a. Notulensi rapat b. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder < 3 c. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder ≥ 3	Tdk memenuhi bukti minimal (0% H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% H)
		2. Kemudahan dan publikasi (D2= 60% x B)		1. Penggunaan naskah akademik dalam Permen (100% x D2)		a. Adopsi naskah akademik dalam peraturan menteri (100% x F)		a. Dokumen naskah akademik Rapermen b. Rancangan awal Rapermen sepenuhnya mengacu pada naskah akademik	Tdk memenuhi bukti minimal (0% H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% H) Memenuhi dan melebihi jumlah

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 24) (Anggota : (60% /jmlh anggota)x 24)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								c Rancangan awal Rapermen tidak mengacu pada naskah akademik d Notulensi pembahasan dengan legislatif e DIM (daftar inventarisasi masalah)	bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 5 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Naskah Akademik Raperda

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 16) (Anggota : (60% /jmlh anggota)x 16)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Naskah Akademik Raperda		1 Kompleksitas (D1=40% x B)		1 Keluasan cakupan (F1=50% x D1)		a Jenis naskah akademik (Raperda) (50% x F1)		a Surat/ nota dinas penyampaian naskah akademik Raperda ke legislatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Dokumen naskah akademik Raperda			
						c Rancangan awal Raperda			
						b Kualitas produk (output) (50% x F1)		a Dokumen naskah akademik Raperda (sesuai dengan outline yang disyaratkan)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
b Dokumen naskah akademik Raperda (tidak sesuai dengan outline yang disyaratkan)									

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 16) (Anggota : (60% /jmlh anggotax 16)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
				2 Tingkat kesulitan isu dan masalah kebijakan (F2=50% x D1) a. Kualitas analisis dalam perumusan kebijakan (F2= 40% x F2)		a Data digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik Raperda menggunakan data sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
						b Teori digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik Raperda menggunakan teori sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 16) (Anggota : (60% /jmlh anggotax 16)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
						c Data dan teori digunakan sebagai dasar analisa (*hanya digunakan ketika data dan teori dipakai sebagai dasar analisa) (100% x F2a)		a Dokumen naskah akademik Raperda menggunakan data dan teori sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
				b. Sektor yang terkait (F2b= 30% x F2)		a Kompleksitas sektor yang terkait dalam penyusunan naskah akademik Raperda (100% x F2b)		a Substansi Dokumen naskah akademik Raperda terdiri dari satu sektor b Substansi Dokumen naskah akademik Raperda terdiri dari multisektor	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
				c. Proses perumusan Naskah Akademik (F2c= 30% x F2)		a Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik Raperda		a Notulensi rapat b Daftar komultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder < 3	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 16) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 16)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						(100% x F2c)		c Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder ≥ 3	melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemanfaatan dan publikasi (D2= 60% x B)		1 Penggunaan naskah akademik dalam Peris (100% x D2)		a Adopsi naskah akademik dalam peraturan daerah (100% x F)		a Dokumen naskah akademik Raperda b Rancangan awal Raperda sepenuhnya mengacu pada naskah akademik c Rancangan awal Raperda tidak mengacu pada naskah akademik d Notulensi pembahasan dengan legislatif e DIM (daftar inventarisasi masalah)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 6 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Naskah Akademik

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 8) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 8)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Naskah Akademik		1 Kompleksitas (D1=40% x B)		1 Keluasan cakupan (F1=50% x D1)		a Jenis naskah akademik (50% x F1) b Kualitas produk (output) (50% x F1)		a Surat/ nota dinas penyampaian naskah akademik ke legislatif b Dokumen naskah akademik c Rancangan awal a Dokumen naskah akademik (sesuai dengan outline yang disarankan) b Dokumen naskah akademik (tidak sesuai dengan outline yang disarankan)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				2 Tingkat kesulitan isu dan masalah kebijakan (F2=50% x D1)					

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 8) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 8)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				a. Kualitas analisis dalam perumusan kebijakan (F2a= 40% x F2)		a Data digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik menggunakan data sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Teori digunakan sebagai dasar analisa (50% x F2a)		a Dokumen naskah akademik menggunakan teori sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah) c Instrumen dan laporan hasil penelitian	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Data dan teori digunakan sebagai dasar analisa (*hanya digunakan ketika data dan teori dipakai		a Dokumen naskah akademik menggunakan data dan teori sebagai dasar analisa b DIM (daftar inventarisasi masalah)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 8) (Anggota : 60% /jmlh anggota)x 8)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						sebagai dasar analisa) (100% x F2a)		c Instrumen dan laporan hasil penelitian	
				b. Sektor yang terkait (F2b= 30% x F2)		a Kompleksitas sektor yang terkait dalam penyusunan naskah akademik (100% x F2b)		a Substansi Dokumen naskah akademik terdiri dari satu sektor b Substansi Dokumen naskah akademik terdiri dari multisektor	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				c. Proses perumusan Naskah Akademik (F2c= 30% x F2)		a Stakeholder yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik (100% x F2c)		a Notulensi rapat b Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder < 3 c Daftar konsultasi dan hasil konsultasi menunjukkan keterlibatan stakeholder ≥ 3	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2	Kemanfaatan dan publikasi (D2= 60% x B)	1	Penggunaan naskah akademik dalam kebijakan	a Adopsi naskah akademik		a Dokumen naskah akademik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil (Ketua : 40% x 8) (Anggota : 60%/jmlh anggota)x 8)	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				(100% x D2)		dalam kebijakan (100% x F)		b Rancangan awal kebijakan sepenuhnya mengacu pada naskah akademik c Rancangan awal Kebijakan tidak mengacu pada naskah akademik d Notulensi pembelahan dengan legislatif e DIM (daftar inventarisasi masalah)	Memenuhi dengan bukti pengganti (75%x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 7 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Policy Brief

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Policy brief (lihat tabel Penyalangan Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)	1	Kompleksitas (60% x B)	1	Keahlian cakupan (25% x D)	F	a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
						b		Dokumen policy brief membahas isu internal organisasi	Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						a		Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
						b		Dokumen policy brief membahas isu antar SKPD dalam Pemda	Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						a		Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
						b		Dokumen policy brief membahas isu antar K/L/Pemda	Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b Dokumen policy brief membahas isu Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D a. Kejelasan argumen (35% x F2)		a Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi tidak jelas (0% x F) b Hanya sebagian (masalah, tujuan,		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b masalah, tujuan, kesimpulan dan rekomendasi dalam dokumen policy brief tidak jelas a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						kesimpulan, rekomendasi) yang jelas (50% x F) c Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi jelas (100% x F)		b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) dalam dokumen policy brief yang jelas a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi dalam dokumen policy brief jelas	Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
				b. Kepetutan isi (35% x F2)		a Manfaat jelas namun rekomendasi kurang tepat (50% x F) b Manfaat kurang jelas namun rekomendasi tepat (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b Manfaat jelas namun rekomendasi dalam dokumen policy brief kurang tepat a Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b Manfaat kurang jelas namun rekomendasi dalam dokumen policy brief tepat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						c. Manfaat jelas dan rekomendasi tepat (100% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b. Manfaat jelas dan rekomendasi dalam dokumen policy brief tepat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
				c. Penggunaan bahasa (jelas, ringkas, menarik) (30% x F2)		a. Policy brief mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik (50% x F) b. Policy brief sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b. Dokumen policy brief mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik a. Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan b. Dokumen policy brief sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						c. Policy brief mudah dipahami dan		a. Surat/Nota Dinas penyampaian policy brief ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		b. Dokumen policy brief mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik	Memenuhi dengan bukti minimal (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
		2. Kemanfaatan (40% x B)		Acuan Rujukan bagi Policy maker (100% x D)		a. Tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (0% x F) b. Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (100% x F)		a. Surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan policy brief sebagai rujukan pengambilan keputusan a. Surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan policy brief sebagai rujukan pengambilan keputusan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti minimal (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL:									

Tabel 8 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Policy Paper

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
Policy paper (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (60% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)				
						b Dokumen policy paper membahas isu internal organisasi		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)					
						a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)					
						b Dokumen policy paper membahas isu antar SKPD dalam Pemda		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)					
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D						c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
										b Dokumen policy paper membahas isu antar K/L/Pemda		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)	
										a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)	
										b Dokumen policy paper membahas isu Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
				a. Kejelasan argumen (25% x F2)		a Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi tidak jelas (0% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)				
						b masalah, tujuan, kesimpulan dan rekomendasi dalam dokumen policy paper tidak jelas		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)					
						a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)					
						b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) yang jelas (50% x F)		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)					
				b. Kepatutan isi (25% x F2)						c Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi jelas (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper yang jelas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
										b Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi dalam dokumen policy paper jelas		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)	
										a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)	
										b Manfaat jelas namun rekomendasi dalam dokumen policy paper kurang tepat		Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
a						a Manfaat jelas namun rekomendasi		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)				
						b Manfaat kurang jelas namun rekomendasi		Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)					

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						tepat (50% x F)		b Manfaat kurang jelas namun rekomendasi dalam dokumen policy paper tepat	pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Manfaat jelas dan rekomendasi tepat (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Manfaat jelas dan rekomendasi dalam dokumen policy paper tepat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				c. Penggunaan bahasa (jelas, ringkas, menarik) (20% x F2)		a Policy paper mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Dokumen policy paper mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Policy paper sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Dokumen policy paper sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Policy paper mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Dokumen policy brief mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				d. Penggunaan sumber data		a		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				[15% x F2]				b Dokumen policy paper memiliki sumber data yang lengkap	pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				e. Inovasi dan kreativitas (15% x F2)		a Penulisan tidak inovatif dan tidak kreatif (0% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Penulisan dokumen policy paper tidak inovatif dan tidak kreatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Penulisan inovatif namun tidak kreatif (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Penulisan dokumen policy paper inovatif namun tidak kreatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Penulisan tidak inovatif namun kreatif (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Penulisan dokumen policy paper tidak inovatif namun kreatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						d Penulisan inovatif dan kreatif (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy paper ke pimpinan b Penulisan dokumen policy paper inovatif dan kreatif	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemanfaatan (40% x E)		1 Sirkulasi Publikasi (40% x F2)		a Nasional (50% x F)		a Bukti publikasi dari pemerintah nasional b Dokumen policy paper dalam bentuk publikasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						b Internasional (100% x F)		a Bukti publikasi dari penerbit internasional	jumlah bukti minimal (100%x H)
				2 Pemanfaatan oleh stakeholder		a Dokumen disebarluaskan secara bebas (50% x F)		a Bukti pengiriman (penyebarluaskan dokumen)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
						b Dokumen tidak disebarluaskan tidak secara bebas (hanya sesuai permintaan) (100% x F)		b Bukti permintaan dokumen	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 9 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Telaahan Staf

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Telaahan Staf (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Anahs Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
								b Dokumen telaahan staf membahas isu antar SKPD dalam Penda	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
								b Dokumen telaahan staf membahas isu antar K/L/Penda	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						(100% x F)		b Dokumen telaahan staf membahas isu Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral)	(75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				2 Tingkat Kesulitan F2 = 75% x D					
				a. Kejelasan argumen (35% x F2)		a Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi tidak jelas (0% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
						b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) yang jelas (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
								b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) dalam dokumen telaahan staf yang jelas	Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						jelas (100% x F)		b Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi dalam dokumen telaahan staf jelas	bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				b. Keputusan isi (35% x F2)		a Manfaat jelas namun rekomendasi kurang tepat (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
						b Manfaat kurang jelas namun rekomendasi tepat (50% x F)		b Manfaat jelas namun rekomendasi dalam dokumen telaahan staf kurang tepat	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
								a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
								b Manfaat kurang jelas namun rekomendasi dalam dokumen telaahan staf tepat	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Manfaat jelas dan rekomendasi tepat (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)
								b Manfaat jelas dan rekomendasi dalam dokumen telaahan staf tepat	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				c. Penggunaan bahasa (jelas, ringkas, menarik) (30% x F2)		a. Telaahan staf mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan b. Dokumen telaahan staf mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b. Telaahan staf sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan b. Dokumen telaahan staf sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c. Telaahan staf mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian telaahan staf ke pimpinan b. Dokumen telaahan staf mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemanfaatan (40% x B)		Acuan Rujukan bagi Policy maker (100% x D)		a. Tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (0% x F)		a. Surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan telaahan staf sebagai rujukan pengambilan keputusan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						b. Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (100% x F)		a. Surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan telaahan staf sebagai rujukan pengambilan keputusan	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 10 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Memo Kebijakan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Memo Kebijakan/ Policy Memo (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (60% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
						c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
						d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
								b Dokumen policy memo membahas isu antar K/L/Pemda		b Dokumen policy memo membahas isu antar K/L/Pemda

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D		a. Kejelasan argumen (35% x F2)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)				
								b Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi tidak jelas (0% x F)		b masalah, tujuan, kesimpulan dan rekomendasi dalam dokumen policy memo tidak jelas		
								b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) yang jelas (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
										b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) yang jelas (50% x F)	b Hanya sebagian (masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi) dalam dokumen policy memo yang jelas	
										c Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi jelas (100% x F)	a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	
											b Masalah, tujuan, kesimpulan, rekomendasi dalam dokumen policy memo jelas	
										b. Kepatutan isi (30% x F2)	a Manfaat jelas namun rekomendasi kurang tepat (50% x F)	a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
											b Manfaat kurang jelas namun	a Surat/Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						rekomendasi tepat (50% x F)		memo ke pimpinan b. Manfaat kurang jelas namun rekomendasi dalam dokumen policy memo tepat	Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c. Manfaat jelas dan rekomendasi tepat (100% x F)		a. Surat/ Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan b. Manfaat jelas dan rekomendasi dalam dokumen policy memo tepat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				c. Penggunaan bahasa (jelas, ringkas, menarik) (50% x F2)		a. Policy memo mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik (50% x F)		a. Surat/ Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan b. Dokumen policy memo mudah dipahami namun penulisan tidak ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b. Policy memo sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik (50% x F)		a. Surat/ Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan b. Dokumen policy memo sulit dipahami namun penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c. Policy memo mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		a. Surat/ Nota Dinas penyampaian policy memo ke pimpinan b. Dokumen policy memo mudah dipahami dan penulisan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2. Kemanfaatan (40% x B)		Acuan Rujukan bagi Policy maker (100% x D)		a. Tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (0% x F) b. Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (100% x F)		a. Surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan policy memo sebagai rujukan pengambilan keputusan a. Surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan policy memo sebagai rujukan pengambilan keputusan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 11 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Laporan Hasil Pemantauan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Laporan Hasil Pemantauan (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Anals Kebijakan)		1 Kompleksitas (60% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xF) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xF) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
						b Dokumen laporan hasil pemantauan dalam lingkup internal organisasi				
						c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat				
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xF) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xF) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
						b Dokumen laporan hasil pemantauan membahas isu antar SKPD dalam Pemda				
						c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat				
c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xF) Memenuhi dengan							

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								b Dokumen laporan hasil pemantauan membahas isu antar K/L/Pemda	bukti pengganti (75%xF) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
								c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	
								d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)	
								a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan	
								b Dokumen laporan hasil pemantauan membahas isu Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral)	
								c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	
2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D									
a Kejelasan argumen (25% x F2)									

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						perbaikan tidak relevan (0% x F)		b Pelaksanaan evaluasi tidak jelas dan rencana aksi perbaikan dalam dokumen hasil pemantauan tidak relevan c Dokumen lampiran : 1) daftar keputusakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
					b Pelaksanaan evaluasi jelas namun rencana aksi perbaikan tidak relevan (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Pelaksanaan evaluasi jelas namun rencana aksi perbaikan dalam dokumen hasil pemantauan tidak relevan c Dokumen lampiran : 1) daftar keputusakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						c Pelaksanaan evaluasi tidak jelas namun rencana aksi perbaikan relevan (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan b Pelaksanaan evaluasi tidak jelas namun rencana aksi perbaikan dokumen hasil pemantauan relevan c Dokumen lampiran : 1) daftar keputusakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
					d Pelaksanaan evaluasi jelas dan rencana aksi perbaikan relevan (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan b Pelaksanaan evaluasi jelas dan rencana aksi perbaikan dokumen hasil pemantauan relevan c Dokumen lampiran : 1) daftar keputusakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				b. Penggunaan bahasa (25% x F2)		a. Tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik (0% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil pemantauan tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b. Mudah dipahami namun penulisan tidak menarik (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil pemantauan mudah dipahami namun penulisan tidak menarik c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c. Tidak mudah dipahami namun penulisan menarik (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								b. Dokumen hasil pemantauan tidak mudah dipahami namun penulisan menarik c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	(75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						d. Mudah dipahami dan penulisan menarik (100% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil pemantauan mudah dipahami dan penulisan menarik c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				c. Penggunaan sumber data (25% x F2)		a. Kelengkapan sumber data (100% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan a. Dokumen hasil pemantauan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				d. Inovasi dan kreativitas (25% x F)		a. Penulisan tidak kreatif dan tidak inovatif (0% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan b. Penulisan dokumen hasil pemantauan tidak inovatif dan tidak kreatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepastakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b. Penulisan inovatif namun tidak kreatif (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan b. Penulisan dokumen hasil pemantauan inovatif namun tidak kreatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepastakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c. Penulisan tidak inovatif namun		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan	Tdk memenuhi bukti minimal

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						kreatif (50% x F)		a. hasil pemantauan ke pimpinan b. Penulisan hasil pemantauan tidak kreatif namun kreatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepastakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	(0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						d. Penulisan inovatif dan kreatif (100% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan ke pimpinan b. Dokumen hasil pemantauan inovatif dan inovatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepastakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2. Kemamfaatan (40% x B)		Acuan Rujukan bagi Policy maker (100% x D)		a. Rencana aksi perbaikan ditindaklanjuti (100% x F)		a. Daftar kegiatan yang dilakukan sebagai tindaklanjut rencana tindak b. Surat pernyataan penggunaan laporan hasil evaluasi sebagai rujukan oleh policy maker	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b. Rencana aksi perbaikan tidak		a. Daftar kegiatan yang dilakukan sebagai	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						ditindaklanjuti (0% x F)		tindaklanjut rencana tindak b Surat pernyataan penggunaan laporan hasil evaluasi sebagai rujukan oleh policy maker	
ANGKA KREDIT TOTAL:									

Tabel 12 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Laporan Hasil Evaluasi

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Laporan Hasil Evaluasi (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (60% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Dokumen hasil evaluasi membahas isu internal organisasi c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Dokumen hasil evaluasi membahas isu antar SKPD dalam Pemerintah daerah c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Dokumen hasil evaluasi antar K/L/Pemerintah daerah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Dokumen hasil evaluasi dalam lingkup Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) c Dokumen policy brief membahas isu Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral)	melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D a. Kepatuhan Isi (25% x F2)		a Tujuan, hasil dan rekomendasi tidak jelas (0% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Tujuan, hasil dan rekomendasi dalam dokumen hasil evaluasi tidak jelas c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						b Hanya salah satu aspek (tujuan, hasil, dan rekomendasi) yang jelas (50% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Hanya salah satu aspek (tujuan, hasil, dan rekomendasi) dalam dokumen hasil evaluasi yang jelas c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						c Tujuan, hasil dan rekomendasi jelas (100% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Tujuan, hasil dan rekomendasi dalam dokumen hasil evaluasi jelas c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				b. Penggunaan Bahasa (25% x F2)		a Tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik (0% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Dokumen hasil evaluasi tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	bukti minimal (100% x H)
						b. Mudah dipahami namun penulisan tidak menarik (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil evaluasi mudah dipahami namun penulisan tidak menarik c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
				c. Penggunaan sumber data (25% x F2)		a. Kelengkapan sumber data (100% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil evaluasi c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
				d. Inovasi dan Kreativitas (25% x F2)		a. Penulisan tidak inovatif dan tidak kreatif (0% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								b. Dokumen hasil evaluasi memiliki penulisan yang tidak inovatif dan tidak kreatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
		2. Kemanfaatan (60% x B)		a. Acuan Rujukan bagi Policy maker (100% x D)		a. Penulisan inovatif namun tidak kreatif (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil evaluasi memiliki penulisan inovatif namun tidak kreatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
						c. Penulisan tidak inovatif namun kreatif (50% x F)		a. Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b. Dokumen hasil evaluasi memiliki penulisan tidak inovatif namun kreatif c. Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d Penulisan inovatif dan kreatif (100% x F)		a Surat/nota dinas penyampaian laporan hasil evaluasi ke pimpinan b Dokumen hasil evaluasi memiliki penulisan inovatif dan kreatif c Dokumen lampiran : 1) daftar kepustakaan 2) laporan hasil penelitian di lapangan (jika ada); 3) berita acara rapat-rapat	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		3 Kemanfaatan (40% x B)		1 Acuan rujukan bagi policy maker (100% x D)		a Rencana aksi perbaikan ditindak lanjuti (100% x F) b Rencana aksi perbaikan tidak ditindak lanjuti (0% x F)		a Daftar kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut rencana tindak b Surat pernyataan penggunaan laporan hasil evaluasi sebagai rujukan oleh policy maker a Daftar kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut rencana tindak b Surat pernyataan penggunaan laporan hasil evaluasi sebagai rujukan oleh policy maker	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 13 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Bahan Pidato/ Ceramah / Presentasi

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bahan Pidato/ Ceramah / Presentasi (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (50% x D) 2 Tingkat kesulitan F2 = 50% x D		a Internal Organisasi (25% x F) b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F) c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F) d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		a Bahan pidato/ ceramah terkait isu internal organisasi b Undangan rapat atau kegiatan yang terkait dengan penyusunan a Bahan pidato/ ceramah terkait isu antar SKPD dalam Pemerintah Daerah b Undangan rapat/ kegiatan yang terkait dengan penyusunan a Bahan pidato/ ceramah terkait isu antar K/L/pemerintah Daerah b Undangan rapat/ kegiatan yang terkait dengan penyusunan a Bahan pidato/ ceramah terkait isu Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) b Undangan rapat/ kegiatan yang terkait dengan penyusunan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				a. Kepatuhan Isi (50% x F2)		a Masalah, analisis, dan kesimpulan tidak jelas (0% x F)		a Bahan pidato/ceramah b Dokumen Pidato/ceramah/presentasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						b Hanya sebagian aspek (masalah, analisis, dan kesimpulan) yang jelas (50% x F)		a Bahan pidato/ ceramah b Dokumen Pidato/ceramah/presentasi	
						c Masalah, analisis, dan kesimpulan jelas (100% x F)		a Bahan pidato/ ceramah b Dokumen Pidato/ceramah/presentasi	
				b. Penggunaan Bahasa (50% x F2)		a Penulisan tidak ringkas dan tidak menarik (0% x F)		a Bahan pidato/ ceramah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						b Penulisan ringkas namun tidak menarik (50% x F)		a Bahan pidato/ ceramah b Dokumen Pidato/ceramah/presentasi	
						c Penulisan tidak ringkas namun menarik (50% x F)		a Bahan pidato/ ceramah b Dokumen Pidato/ceramah/presentasi	
						d Penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		a Bahan pidato/ ceramah b Dokumen Pidato/ceramah/presentasi	
		2	Kemampuan (50% x B)	Acuan dalam bahan pidato/ ceramah / presentasi (100% x D)		a Digunakan sebagai bahan pidato/ ceramah / presentasi (100% x F)		a Dokumen Pidato/ceramah/presentasi b Bahan pidato/ ceramah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						b Tidak digunakan sebagai bahan pidato/ ceramah / presentasi (0% x F)		a Dokumen Pidato/ceramah/presentasi b Bahan pidato/ ceramah	bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 14 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Monograf Kebijakan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Monograf Kebijakan (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		Kompleksitas (40% x B)		1 Tingkat kesulitan (F2 = 100% x D)		a. Orisinalitas (50% x F2)		a. Tidak orisinal (0% x F)		a. Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
								b. Surat pernyataan orisinal		b. Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)
				b. Visibilitas (50% x F2)		a. Substansi tidak menarik, tidak jelas dan sulit dipahami (0% x F)		a. Dokumen monograf kebijakan		a. Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b. Surat pernyataan orisinal		b. Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
						b. Substansi menarik namun tidak jelas dan tidak mudah dipahami (50% x F)		a. Dokumen Monograf kebijakan memiliki substansi menarik namun tidak jelas dan tidak mudah dipahami		a. Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)
								b. Dokumen Monograf kebijakan memiliki substansi menarik namun tidak jelas dan tidak mudah dipahami		b. Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
						c. Substansi tidak menarik namun jelas dan mudah dipahami (50% x F)		a. Dokumen Monograf kebijakan memiliki substansi tidak menarik namun jelas dan mudah dipahami		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)		
								b. Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)				
						d. Substansi menarik, jelas, dan mudah dipahami (100% x F)		a. Dokumen Monograf kebijakan memiliki substansi menarik, jelas dan mudah dipahami		a. Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)		
										b. Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)		
						2. Kemanfaatan (60% x B)		1. Sirkulasi (40% x D)		a. Nasional (50% x F)	a. Bukti publikasi dari penerbit nasional	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
											b. Dokumen monograf kebijakan dalam bentuk publikasi	b. Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)
	2. Pemanfaatan oleh Stakeholder (60% x D)	b. Internasional (100% x F)	a. Bukti publikasi dari penerbit internasional	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)								
			b. Dokumen monograf kebijakan dalam bentuk publikasi	b. Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)								
			a. Dokumen disebarluaskan secara bebas (50% x F)	a. Bukti pengiriman (penyebarluasan dokumen)	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)							
				b. Dokumen disebarluaskan tidak secara bebas (hanya)	b. Bukti permintaan dokumen	Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)						

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						sesuai permintaan (100% x F)			
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 15 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Buku Referensi Nasional

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Buku referensi nasional (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Lokal (25% x F) b Regional (50% x F) c Nasional (75% x F) d Internasional (100% x F)		a Topik dokumen buku referensi dalam lingkup lokal b Bukti publikasi buku referensi kebijakan a Topik dokumen uku referensi dalam lingkup regional b Bukti publikasi buku referensi kebijakan a Topik dokumen uku referensi dalam lingkup nasional b Bukti publikasi buku referensi kebijakan a Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
								b Bukti publikasi buku referensi kebijakan	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
				2	Tingkat kesulitan F2 - 75% x D					
				a.	Orisinalitas (50% x F2)	a	Tidak orisinal (0% x F)	a Dokumen buku referensi b Surat pernyataan orisinalitas	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
						b	Orisinal (100% x F)	a Dokumen buku referensi b Surat pernyataan orisinalitas	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
				b.	Visibilitas (50% x F)	a	Substansi tidak menarik, tidak jelas dan sulit dipahami	a Dokumen buku referensi	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
						(0% x F)			Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
						b	Substansi menarik, namun tidak jelas dan tidak mudah dipahami (50% x F)	a Dokumen buku referensi	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
						c	Substansi tidak menarik namun jelas dan mudah dipahami (50% x F)	a Dokumen buku referensi		
						d	Substansi menarik, jelas, dan mudah dipahami (100% x F)	a Dokumen buku referensi	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
		2	Kemanfaatan (50% x F)	1	Sirkulasi (dalam publikasi) (100% x F)	a	Nasional (100% x F)	a Bukti publikasi dari penerbit nasional b Dokumen buku referensi	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
ANGKA KREDIT TOTAL										

Tabel 16 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Buku Referensi Internasional

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
Buku referensi internasional (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1	Kompleksitas (50% x B)	1	Keluasan cakupan (25% x D)	a	Lokal (25% x F)		a	Topik dokumen buku referensi dalam lingkup lokal	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)								
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup regional		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)							
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup nasional			Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)						
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional				Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)					
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional					Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)				
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional						Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)			
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional							Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)		
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional								Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)	
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional									Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						b	Bukti publikasi buku referensi kebijakan		a	Topik dokumen uku referensi dalam lingkup internasional									
2	Tingkat kesulitan F2 = 75% x D																		
a.	Orisinalitas (50% x F2)	a	Tidak orisinal (0% x F)		a	Dokumen buku referensi		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)											
b	Orisinal (100% x F)	b	Orisinal (100% x F)		a	Dokumen buku referensi			Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)										

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
								b	Surat pernyataan orisinalitas	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
				b.	Visibilitas (50% x F)	a	Substansi tidak menarik, tidak jelas dan sulit dipahami (0% x F)	a	Dokumen buku referensi	
				b.	Visibilitas (50% x F)	b	Substansi menarik, namun tidak jelas dan tidak mudah dipahami (50% x F)	a	Dokumen buku referensi	
				b.	Visibilitas (50% x F)	c	Substansi tidak menarik namun jelas dan mudah dipahami (50% x F)	a	Dokumen buku referensi	
				b.	Visibilitas (50% x F)	d	Substansi menarik, jelas, dan mudah dipahami (100% x F)	a	Dokumen buku referensi	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2 Kemanfaatan (50% x F)		1 Sirkulasi (dalam publikasi) (100% x F)		a Internasional (100% x F)		a Bukti publikasi dari penerbit nasional b Dokumen buku referensi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 17 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Artikel di media massa

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Artikel di media massa (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kemanfaatan (100% x B)		1 Publikasi (100% x D)		a Lokal (25% x F) b Nasional (75% x F) c Internasional (100% x F)		a Surat penerimaan dari media masa b Dokumen artikel a Surat penerimaan dari media masa b Dokumen artikel a Surat penerimaan dari media masa b Dokumen artikel	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 18 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1. Kemanfaatan (100% x B)		1. Publikasi (100% x D)		a. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi (100% x F)		a. Surat penerimaan dari jurnal ilmiah (LOA) b. Dokumen artikel kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 19 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1. Kemanfaatan (100% x B)		1. Publikasi (100% x D)		a. Jurnal ilmiah terakreditasi (100% x F)		a. Surat penerimaan dari jurnal ilmiah (LOA) b. Dokumen artikel kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 20 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Artikel dalam jurnal internasional

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
Artikel dalam jurnal internasional (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kemudahan (100% x B)		1 Publikasi (100% x D)		a Jurnal ilmiah internasional yang terindeks dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi lain, termasuk aggregator (Google Scholar, EBSCO, Proquest, Osis, dan/atau lainnya yang setara) (50% x F)		a Surat penerima dari jurnal ilmiah (LOA)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)							
						b Dokumen artikel kebijakan										
						b Jurnal ilmiah internasional yang terindeks dalam Directory of Open Access Journal (DOAJ), IEEE, Pubmed, CAB, dan/atau yang setara (75% x F)		a Surat penerimaan dari jurnal ilmiah (LOA)		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)						
						b Dokumen artikel kebijakan										
						c Jurnal ilmiah internasional yang terindeks dalam Web of Science (Thomson Reuters dan/atau Scopus) (100% x F)		a Surat penerimaan dari jurnal ilmiah (LOA)	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)							
						b Dokumen artikel kebijakan										
						ANGKA KREDIT TOTAL										

Tabel 21 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Makalah Kebijakan Nasional

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Makalah kebijakan nasional (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait internal organisasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar			
						c Surat/ nota dinas			
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar			
						c Surat/ nota dinas			
						c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait Antar K/L/Pemerintah Daerah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
						b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar			
						c Surat/ nota dinas			

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar b Surat/ nota dinas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D a. Kejelasan argumen (50% x F2)		a Masalah, analisis dan kesimpulan tidak jelas (0% x F) b Masalah dan analisis jelas namun kesimpulan tidak relevan (50% x F)		a Masalah, analisis dan kesimpulan dalam dokumen makalah kebijakan tidak jelas b Masalah dan analisis jelas namun kesimpulan dokumen makalah kebijakan tidak relevan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						c Masalah dan analisis tidak jelas namun kesimpulan relevan (50% x F) d Masalah, analisis dan kesimpulan jelas (100% x F)		a Masalah dan analisis jelas namun kesimpulan dokumen masalah kebijakan tidak relevan c Masalah, analisis, dan kesimpulan dalam dokumen makalah kebijakan jelas dan relevan	
				b Penggunaan Bahasa (50% x F2)		a Penulisan tidak ringkas dan tidak menarik (0% x F) b Penulisan ringkas namun tidak menarik (50% x F) c Penulisan tidak ringkas namun menarik (50% x F) d Penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		a Penulisan dalam dokumen makalah kebijakan tidak ringkas dan tidak menarik a Penulisan dalam dokumen makalah kebijakan ringkas namun tidak menarik a Penulisan dalam dokumen makalah tidak ringkas namun menarik a Penulisan dalam dokumen makalah kebijakan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2 Kemamfaatan (50% x B)		Forum presentasi (100% x D)		a Nasional (100% x F)		a Sertifikat/bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 22 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Makalah Kebijakan Internasional

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Makalah kebijakan Internasional (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (50% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait internal organisasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar	
								c Surat/ nota dinas	
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar	
								c Surat/ nota dinas	
c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait Antar K/L/Pemerintah Daerah	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)						
				b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar					

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) (100% x F)		a Topik dokumen makalah kebijakan terkait Nasional atau Antar Negara (Internasional, Bilateral, Multilateral) b Sertifikat bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar c Surat/ nota dinas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D					
				a. Kejelasan argumen (50% x F2)		e Masalah, analisis dan kesimpulan tidak jelas (0% x F) b Masalah dan analisis jelas namun kesimpulan tidak relevan (50% x F)		e Masalah, analisis dan kesimpulan dalam dokumen makalah kebijakan tidak jelas a Masalah dan analisis jelas namun kesimpulan dokumen makalah kebijakan tidak relevan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						c Masalah dan analisis tidak jelas namun kesimpulan relevan (50% x F) d Masalah, analisis dan kesimpulan jelas (100% x F)		a Masalah dan analisis jelas namun kesimpulan dokumen makalah kebijakan tidak relevan a Masalah, analisis dan kesimpulan dalam dokumen makalah kebijakan jelas dan relevan	
				b. Penggunaan Bahasa (50% x F2)		a Penulisan tidak ringkas dan tidak menarik (0% x F) b Penulisan ringkas namun tidak menarik (50% x F) c Penulisan tidak ringkas namun menarik (50% x F) d Penulisan ringkas dan menarik (100% x F)		a Penulisan dalam dokumen makalah kebijakan tidak ringkas dan tidak menarik a Penulisan dalam dokumen makalah kebijakan ringkas namun tidak menarik a Penulisan dalam dokumen makalah tidak ringkas namun menarik a Penulisan dalam dokumen makalah kebijakan ringkas dan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2 Kemanfaatan (50% x B)		Forum presentasi (100% x D)		a Internasional (100% x F)		a Sertifikat/bukti penyajian makalah kebijakan dari panitia Seminar	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti(75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 23 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Bahan Modul diklat

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Modul diklat (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kemanfaatan (100% x B)		1 Sirkulasi (100% x D)		a	Lokal (50% x F)	a Berita Acara Pembahasan modul yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat;	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b Modul Diklat (cetak bukan print out atau fotocopy) dengan Kata Pengantar dari Pimpinan Lembaga Diklat yang bersangkutan	
								c Kurikulum Diklat yang menjadi dasar penyusunan Modul Diklat	
								d Surat keterangan penggunaan modul dalam diklat	
							Nasional (100% x F)	a Berita Acara Pembahasan modul yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat;	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b Modul Diklat (cetak bukan print out atau fotocopy) dengan Kata Pengantar dari Pimpinan Lembaga Diklat yang bersangkutan	
								c Kurikulum Diklat yang menjadi dasar penyusunan Modul Diklat	
								d Surat keterangan penggunaan modul dalam diklat	
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 24 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Model Kebijakan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Model Kebijakan (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (50% x D)		a Nasional (50% x F)		a Keluasan cakupan dokumen model kebijakan berskala nasional	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)		
						b Internasional (100% x F)		b Keluasan cakupan dokumen model kebijakan berskala internasional			
				2 Tingkat Kesulitan F2 = 50% x D		a. Orisinalitas Model (50% x F2)		a Tidak orisinal (0% x F)		a Dokumen model kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b Orisinal (100% x F)		a Dokumen model kebijakan b Surat pernyataan orisinalitas	
						b. Tingkat kemudahan dalam pemahaman model (50% x F2)		a Tidak mudah dipahami (50% x F)		a Dokumen model kebijakan tidak mudah dipahami b Dokumen evaluasi penggunaan model kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
								b Mudah dipahami (100% x F)		a Dokumen model kebijakan mudah dipahami b Dokumen evaluasi penggunaan model kebijakan	

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2 Kemanfaatan (50% x B)		1 Penggunaan model kebijakan (100% x D)		a Tidak digunakan (0% x F) b Digunakan (100% x F)		a Surat keterangan penggunaan model kebijakan a Surat keterangan penggunaan model kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 25 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Alat Bantu

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
Alat Bantu (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (50% x D)		a Nasional (50% x F)		a Alat peraga/visualisasi dalam lingkup nasional	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)					
						b Internasional (100% x F)		b Alat peraga/visualisasi dalam lingkup internasional	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)					
				2 Tingkat Kesulitan F2 = 50% x D		a. Orisinalitas Model (50% x F2)		a Tidak orisinal (0% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)				
								b Orisinal (100% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)				
						b. Tingkat kemudahan dalam pemahaman model (50% x F2)		a Tidak mudah dipahami (50% x F)	a Alat peraga/visualisasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)				
		b Mudah dipahami (100% x F)		b Dokumen evaluasi penggunaan alat bantu				Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)						
		2 Kemantapan (50% x B)		1 Penggunaan model kebijakan (100% x D)					a Tidak digunakan (0% x F)		a Surat keterangan penggunaan model kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)		
											b Digunakan (100% x F)	a Surat keterangan penggunaan model kebijakan	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)	
									b. Tingkat kemudahan dalam pemahaman model (50% x F2)		a. Orisinalitas Model (50% x F2)	a Tidak orisinal (0% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
												b Orisinal (100% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)
b Mudah dipahami (100% x F)	b Dokumen evaluasi penggunaan alat bantu		Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)											
ANGKA KREDIT TOTAL														

Tabel 26 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Alat Bantu Gambar/Suara Diklat

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
Alat bantu gambar/suara diklat (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (50% x B)		1 Keluasan cakupan (50% x D)		a Nasional (50% x F)		a Alat peraga/visualisasi dalam lingkup nasional	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)					
						b Internasional (100% x F)		b Alat peraga/visualisasi dalam lingkup internasional	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)					
				2 Tingkat Kesulitan F2 = 50% x D		a. Orisinalitas Model (50% x F2)		a Tidak orisinal (0% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)				
								b Orisinal (100% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)				
						b. Tingkat kemudahan dalam pemahaman model (50% x F)		a. Orisinalitas Model (50% x F2)	a Tidak mudah dipahami (50% x F)	a Alat peraga/visualisasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)			
		b Mudah dipahami (100% x F)		b Dokumen evaluasi penggunaan alat bantu					Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)					
		2 Kemantapan (50% x B)		1 Penggunaan model kebijakan (100% x D)					a Tidak digunakan (0% x F)		a Surat keterangan penggunaan model kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)		
											b Digunakan (100% x F)	a Surat keterangan penggunaan model kebijakan	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)	
									b. Tingkat kemudahan dalam pemahaman model (50% x F2)		a. Orisinalitas Model (50% x F2)	a Tidak orisinal (0% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH)
												b Orisinal (100% x F)	a Alat peraga/visualisasi orisinalitas	Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H)
b Mudah dipahami (100% x F)	b Dokumen evaluasi penggunaan alat bantu		Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)											

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2 Kemanfaatan (50% x B)		1 Penggunaan model kebijakan (100% x D)		a Tidak digunakan (0% x F) b Digunakan (100% x F)		a Surat keterangan penggunaan model kebijakan a Surat keterangan penggunaan model kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 27 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Buku pedoman

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Buku Pedoman (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kemanfaatan (100% x B)		1 Sirkulasi (100% x D)		a Lokal (50% x F) b Nasional (100% x F)		a Dokumen buku pedoman b Surat pernyataan orisinalitas c Surat keterangan penggunaan buku pedoman a Dokumen buku pedoman b Surat pernyataan orisinalitas c Surat keterangan penggunaan buku pedoman	Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0% x H) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 28 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Juklak/Juknis

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
Juklak/Juknis (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kemanfaatan (100% x B)		1 Sirkulasi (100% x D)		a	Lokal (50% x F)	a	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)				
								b		Dokumen juklak/juknis			
								c					
										a	Nasional (100% x F)	a	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75% x H) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%xH)
										b		Dokumen juklak/juknis	
										c			
ANGKA KREDIT TOTAL													

Tabel 29 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Surat Penugasan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Surat Penugasan (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analisis Kebijakan)		1 Kompleksitas (100% x B)		1 Keluasan cakupan (100% x D)		a	Internal Organisasi (2 5% x F)	a	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100% x H)	
								b		Surat Penugasan
								c		
										d
ANGKA KREDIT TOTAL										

Tabel 31 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Laporan Advokasi Kebijakan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Laporan Advokasi Kebijakan (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analsis Kebijakan)		1 Kompleksitas (60% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F)		a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
						b Dokumen hasil advokasi kebijakan membahas isu internal organisasi					
						c Dokumen berita acara rapat-rapat					
						b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Dokumen hasil advokasi kebijakan membahas isu internal organisasi					
						c Dokumen berita acara rapat-rapat					
						c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Dokumen hasil advokasi kebijakan membahas isu internal organisasi					
						c Dokumen berita acara rapat-rapat					
						d Nasional atau Antar Negara (Internasion)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D) Penggunaan Bahasa (100% x F2)		a Bilateral, Multilateral (100% x F)		b Dokumen hasil advokasi kebijakan membahas isu internal organisasi	bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)		
						c Dokumen berita acara rapat-rapat					
						a Tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik (0% x F)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Dokumen laporan hasil advokasi kebijakan tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik					
						b Mudah dipahami namun penulisan tidak menarik (50% x F)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
						b Dokumen laporan hasil advokasi kebijakan namun penulisan tidak menarik					
						c Tidak mudah dipahami namun penulisan menarik (50% x F)			a Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil advokasi ke pimpinan		Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah
						b Dokumen laporan hasil advokasi kebijakan tidak mudah dipahami namun penulisan menarik					

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d	Mudah dipahami dan penulisan menarik (100% x F)	a Surat/Nota Dinas penyempitan laporan hasil advokasi ke pimpinan b Dokumen laporan hasil advokasi kebijakan mudah dipahami dan penulisan menarik	bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemudahan (40% x B)		1 Acuan rujukan bagi policy maker (100% x D)		a Hasil advokasi ditindak lanjuti (100% x F) b Hasil advokasi tidak ditindak lanjuti (0% x F)		a Daftar kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil advokasi	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Tabel 32 Penghitungan Angka Kredit Satuan Hasil Laporan Diseminasi Kebijakan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Laporan Diseminasi Kebijakan (lihat tabel Pendistribusian Angka Kredit Per Analis Kebijakan)		1 Kompleksitas (60% x B)		1 Keluasan cakupan (25% x D)		a Internal Organisasi (25% x F) b Antar SKPD dalam Pemerintah Daerah (50% x F) c Antar K/L/Pemerintah Daerah (75% x F) d Nasional atau Antar Negara (Internasional & Bilateral)		a Surat/Nota Dinas penyempitan laporan diseminasi kebijakan ke pimpinan b Dokumen hasil diseminasi kebijakan membahas isu internal organisasi c Dokumen berita acara rapat-rapat a Surat/Nota Dinas penyempitan laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan b Dokumen hasil diseminasi kebijakan membahas isu internal organisasi c Dokumen berita acara rapat-rapat a Surat/Nota Dinas penyempitan laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan b Dokumen hasil diseminasi kebijakan membahas isu internal organisasi c Dokumen berita acara rapat-rapat a Surat/Nota Dinas penyempitan laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xH) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						Multilateral (100% x F)		b) Dokumen hasil diseminasi kebijakan membahas isu internal organisasi c) Dokumen berita acara rapat-rapat	bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
				2 Tingkat kesulitan F2 = 75% x D Penggunaan Bahasa (100% x F2)		a) Tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik (0% x F) b) Mudah dipahami namun penulisan tidak menarik (50% x F) c) Tidak mudah dipahami namun penulisan menarik (50% x F)		a) Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan b) Dokumen laporan hasil diseminasi kebijakan tidak mudah dipahami dan penulisan tidak menarik a) Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan b) Dokumen laporan hasil diseminasi kebijakan mudah dipahami namun penulisan tidak menarik a) Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan b) Dokumen laporan hasil diseminasi kebijakan tidak mudah dipahami namun penulisan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H) Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)

SATUAN HASIL	AK maks Satuan Hasil	KRITERIA	AK maks Kriteria	SUB-KRITERIA	AK maks Sub-Kriteria	INDIKATOR	AK maks indikator	BUKTI	AK TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						d) Mudah dipahami dan penulisan menarik (100% x F)		a) Surat/Nota Dinas penyampaian laporan hasil diseminasi kebijakan ke pimpinan b) Dokumen laporan hasil diseminasi kebijakan mudah dipahami dan penulisan menarik	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
		2 Kemudahan (40% x B)		1 Acuan rujukan bagi policy maker (100% x D)		a) Hasil diseminasi kebijakan diundak lanjut (100% x F) b) Hasil diseminasi kebijakan tidak diundak lanjut (0% x F)		a) Daftar kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil diseminasi kebijakan	Tdk memenuhi bukti minimal (0%xH) Memenuhi dengan bukti pengganti (75%xI) Memenuhi dan melebihi jumlah bukti minimal (100%x H)
ANGKA KREDIT TOTAL									

Formulir Self-Assessment

Nama :

Jabatan :

Petunjuk pengisian:

Self assessment ini berisi rekapitulasi penjelasan yang harus diisi AK tentang semua proses penyusunan seluruh satuan hasil yang telah dibuat. Beberapa pertanyaan kunci yang harus dijawab antara lain:

- Bagaimana proses penyusunan masing-masing satuan hasil dari awal hingga akhir (jelaskan pula alasan pemilihan satuan hasil tersebut)?
 - Siapa saja stakeholder yang terkait dalam penyusunan satuan hasil tersebut?
 - Apa peran dan kontribusi Anda dalam pengerjaan satuan hasil tersebut?
 - Bagaimana orisinalitas satuan hasil yang Anda susun? (penjelasan tentang orisinalitas ini wajib diberikan bagi satuan hasil policy brief dan policy paper)
 - Kapan satuan hasil tersebut mulai disusun?
-

No.	Satuan hasil kerja	Proses penyusunan	Stakeholder yang terkait	Peran dan kontribusi	Pernyataan Orisinalitas	Waktu penyusunan